

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TONGAUNA
KABUPATEN KONAWE**

¹Fistarisma Ishak, ²Rostin dan ³Ambo Wonua Nusantara
¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
^{2,3}Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
Email: vistarisma11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of public participation and factors that effects the level of public participation on development of Tongauna District, Konawe Regency. Data collected through interviews and questionnaires with 60 respondents. The results showed that public participation in development of District of Tongauna for all indicators considered good enough. In the other sides, there are some problem that effects on public participation in Tongauna District, consits: the lack of knowledge, times, and jobs.

Keywords: *public, participation, development*

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat, guna pencapaian taraf hidup yang layak. Dengan demikian, pembangunan daerah merupakan wahana dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spritual, disamping itu untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Usaha untuk mempercepat terwujudnya kehendak rakyat tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan hak otonom kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang memberikan isyarat bahwa pelaksanaan pembangunan didaerah harus ditunjukkan pada penyusunan strategi yang relevan dengan potensi yang ada didalamnya, guna meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan pada masa yang akan datang. Pembangunan disuatu daerah akan berjalan dengan baik apabila dipadukan antara kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan kondisi serta aspirasi masyarakat dan wilayah yang bersangkutan. Dalam era pembangunan sekarang ini, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana seluruh wilayah pemerintahan termasuk wilayah Kecamatan diberikan kewenangan yang semakin luas dalam mengurus kepentingannya, maka pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Kecamatan selaku penyelenggara dari penanggung jawab utama, mengatur dan mengarahkan segala sumber-sumber faktor sosial ekonomi diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah daerah harus dapat memposisikan

diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung program dan tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimilikinya, dengan menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, Sumodiningrat (1991:34) dalam paradigma pembangunan partisipatif menuntut akan adanya pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program yang berhubungan langsung terhadap kehidupan mereka. Siklus interaksi antara Pemerintah dan masyarakat pada gilirannya mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru dalam memahami, menelaah dan memecahkan berbagai masalah pembangunan didaerah.

Seperti wilayah lainnya, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebagai salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan berbagai pembangunan disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial politik, serta kebersihan. Namun masih cukup banyak implementasi pembangunan yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh para perencana (Bappeda Kecamatan Tongauna 2008). Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kecamatan Tongauna ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan.

Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan keacuhan antar masyarakat. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Tongauna tingkat dan bentuk partisipasinya berbeda-beda.

Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe. Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan di Kecamatan Tongauna. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga penyelenggara pembangunan di Kecamatan Tongauna belum didukung oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang belum diperbaiki seperti jalan raya dan jembatan, sarana dan prasarana teknis lainnya seperti perbaikan kantor camat, perbaikan kantor PKK yang terlihat belum memadai. Kondisi pembangunan di Kecamatan Tongauna seperti yang diuraikan diatas, tentunya akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di Kecamatan tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tongauna, dengan kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. Berdasarkan uraian tersebut kiranya penting untuk mengkaji bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna?

2. Studi Literatur

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya, definisi partisipasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebagai penciptaan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan, mempengaruhi proses pembangunan itu dan turut menikmati hasilnya (Anonim, 1999). Sementara menurut Badudu dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991), secara etimologi, partisipasi merupakan kata saduran dari bahasa Belanda (*participatie*) dan bahasa Inggris (*participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan.

Partisipasi menurut Conyers adalah alat yang berguna untuk memperoleh akses informasi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat, pemberian usul serta representatif kehadiran karena tanpa kehadiran masyarakat, maka pengembangan pembangunan akan gagal (Conyers, 1991:154-155). Hal senada juga dikemukakan oleh Tikson (2001:1) bahwa partisipasi dalam pembangunan merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai stakeholder terlibat, mempengaruhi, mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing. Disamping itu mereka juga turut serta secara aktif dalam memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan sumber daya serta penggunaannya.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010). Partisipasi masyarakat adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2001). Partisipasi dapat menentukan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam organisasi, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Partisipasi akan berjalan apabila adanya kemauan dari setiap individu dan organisasi untuk ikut berperan serta dalam partisipasi Sundariningrum (Sugiyah, 2001) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (1) Partisipasi Langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya; dan (b) Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju kearah yang lebih baik. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan

pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja (1998) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

Siagian (1996) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Mansour (2002) menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:

- 1) Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia.
- 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan diseluruh daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus dimulai dengan perencanaan yaitu: (a) Mengadakan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dana tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga yang penting untuk sektor-sektor prioritas; dan (b) Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan menurut Abe (2001) adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
- 2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Angell (Ross, 1967) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- 1) Faktor Kesadaran/Kemauan

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

- 2) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- 3) Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial

yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

4) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

6) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

7) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pemerintah selaku pengemban amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.

8) Peralatan/Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

Upaya mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat normal maupun bersifat informal, maka yang menjadi faktor pertimbangan pokok adalah tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pendirian organisasi itu belum tercapai atau sangat sulit dicapai itulah yang menjadi hambatan. Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001) yaitu :

a) Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang merasa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi suatu pembangunan, pola pikir yang tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b) Waktu

Masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.

c) Terbatasnya lapangan pekerjaan dipedesaan

Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan, sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian dengan cara melaksanakan observasi terhadap berbagai macam pelaksanaan pembangunan, dan wawancara dengan menggunakan kuisioner kepada responden. Data primer antara lain: tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berupa pelaksanaan gotong royong, sumbangan dalam bentuk materi dan tenaga, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir; dan (b) Data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber dengan cara menelaah buku-buku, dokumen, laporan pelaksanaan pembangunan, serta mengutip dan mencatat berbagai informasi dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder antara lain: keadaan wilayah, jumlah penduduk, struktur umur, jumlah Kepala Keluarga, jenis mata pencaharian penduduk, dan berbagai laporan hasil kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Pengambilan sample dilakukan secara purposive, sebanyak 60 kepala keluarga (KK). Data yang di kumpulkan akan di analisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada analisis kualitatif, kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Analisis tersebut di dukung oleh tabel frekuensi pada beberapa variabel pendukung yang di jadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan dengan tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala. Adapun rumus yang digunakan (Sumber: Pasaribu dalam Suryawan Adib, 2004:73) adalah :

1. Nilai Skor = Frekuensi x Nilai Bobot

2. Rata-rata Skor = $\frac{\text{Nilai Skor}}{N}$

Berdasarkan perhitungan hasil analisis partisipasi masyarakat dan berbagai usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat dilihat dengan menggunakan Rentang Skala Nilai Mutu dengan sebutan sebagai berikut:

1. Tinggi : > 3
2. Sedang : 2 – 3
3. Rendah : < 2

Analisa ini di maksudkan agar temuan-temuan dari berjalan tidaknya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di lokasi penelitian dapat di kaji lebih mendalam dari fenomena yang ada dapat di gambarkan secara lebih terperinci.

4. Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat terintegrasi dan sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan
- b. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi.
- c. Partisipasi dalam perencanaan.
- d. Partisipasi dalam melaksanakan operasional.
- e. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Kecamatan Tongauna dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal. Maka menurut penulis ada empat aspek yang bentuk ideal partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan ide-ide/pemikiran (non fisik), bantuan keuangan, bantuan material, dan partisipasi secara langsung (tenaga).

Partisipasi dalam Bentuk Non Fisik

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Salah satu contohnya adalah ide perluasan jalan menuju area persawahan serta pembuatan aliran irigasi menuju area persawahan warga terutama saat musim kemarau yang terjadi. Penyaluran ide-ide atau sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan Berikut ini dapat dilihat keaktifan responden dalam menyumbangkan ide/saran dalam proses pembangunan di Kecamatan Tongauna.

Tabel 1 Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Ide/Pikiran
Di Kecamatan Tongauna

Responden	Bobot Nilai	Frekuensi	Jumlah Skor	%
Sangat Aktif	4	15	60	35,93
Aktif	3	25	75	44,91
Kurang Aktif	2	12	24	14,37
Tidak Aktif	1	8	8	4,79
Jumlah	-	60	167	100

Sumber: data primer di olah Tahun 2015

Berdasarkan pada Tabel 1 partisipasi responden dalam memberikan ide-ide/pemikirannya untuk pembangunan di Kecamatan Tongauna. Responden yang memberikan jawaban aktif sebanyak 25 responden dengan persentase 44,91%. Hal ini di dukung oleh jumlah skor yang dicapai yaitu 2,78 berarti pada kategori sedang dengan cara perolehan rata-rata skor sebagai berikut :

$$F \times \text{Bobot Nilai} = \text{Jumlah Skor}$$

$$15 \times 4 = 60$$

$$\frac{\text{Jumlah Skor Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}} = \text{Rata-Rata Skor}$$

$$\frac{167}{60} = 2,78$$

Berdasarkan wawancara langsung terhadap beberapa responden maka diketahui bahwa rata-rata responden yang menyatakan sangat aktif mengikuti rapat dan memberikan pendapat dan sarannya karena mereka selalu di undang oleh pemerintah Kecamatan untuk rapat. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan. Alasan lain yang diperoleh sehingga responden kurang aktif dan tidak aktif dalam memberikan saran atau pendapatnya karena mereka tidak pernah diundang, di samping itu ada juga masyarakat yang pasif mengikuti rapat karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Ibu Hasmiah, sekertaris Desa Momea, (wawancara tanggal 18 November 2015) yang mengatakan bahwa:

“...kami sering mengundang masyarakat jika ada pembangunan yang akan di laksanakan tapi terkadang yang datang hanya itu-itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara, dan orang-orang yang kurang aktif itu biasanya terkendala, karena mereka hanya datang dan mendengarkan. Tapi mereka biasa aktif jika pelaksanaan pembangunan di lapangan..”

Walaupun tingkat partisipasi non fisik masyarakat dalam kategori sedang, tidak berarti dalam pemikiran yang bersumber dari masyarakat tidak diakomodasi secara proporsional.

Partisipasi dalam Bentuk Bantuan Keuangan

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang di alami setiap daerah tak terkecuali Kecamatan Tongauna.

Untuk mengantisipasi fenomena tersebut di atas, berbagai upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Tongauna dalam bentuk bantuan keuangan adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. Untuk mengetahui lebih jelas partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan di Kecamatan Tongauna dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Bantuan Keuangan di Kecamatan Tongauna

Partisipasi Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Sering	18	41,38
Sering	25	43,11
Jarang	10	11,49
Tidak Pernah	7	4,02
Jumlah	60	100

Sumber : data primer di olah Tahun 2015

Data pada Tabel 2 memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan. Responden lebih banyak memberikan penilaian sering yaitu sebanyak 25 responden dan didukung oleh jumlah skor yang dicapai 2,9 itu berarti berada pada kategori sedang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan, karena tanpa adanya swadaya dari masyarakat dan hanya mengandalkan bantuan Kecamatan maka pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Adapun masyarakat yang tidak pernah memberikan bantuan keuangan untuk membangun, menurut beberapa responden karena kebutuhan hidup mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian serta pengalaman langsung peneliti, diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk bantuan keuangan mencapai frekuensi sedang karena untuk menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan sangat mudah prosedurnya dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Kenyataan seperti itu memberikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan sebagai suatu bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa kesadaran akan pembangunan membutuhkan dana yang cukup.

Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Material

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk bantuan material. Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam

bentuk bantuan material seperti batu, pasir, semen, kayu balok, kayu papan bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya (uang atau material). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Bantuan material biasanya dilakukan secara langsung. Dimana bantuan material tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan masjid, jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material disajikan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Bantuan Material di Kecamatan Tongauna

Patisipasi Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Sering	-	-
Sering	-	-
Jarang	45	85,71
Tidak Pernah	25	14,29
Jumlah	60	100,00

Sumber : data primer di olah Tahun 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material di Kecamatan Tongauna, dari 60 responden, yang menjawab sangat sering tidak ada. Responden lebih banyak menjawab jarang yaitu 45 responden dengan persentase 85,71%, sedangkan skor yang dicapai adalah 1,75 berarti berada pada kategori rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material berada dalam kategori rendah, karena berdasarkan wawancara langsung dengan responden mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak menyumbangkan dalam bentuk bantuan keuangan. Alasan lain yang diungkapkan responden bahwa untuk menyumbang dalam bentuk bantuan material prosedurnya agak dan menyita waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak Basrin yang mengatakan bahwa:

“...jarang sekali masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk bantuan material. Mereka lebih memilih memberikan uang, karena mereka tidak repot. Namun ada juga yang memang memberikan material seperti kayu, pasir, batu dan lain-lain...” (wawancara tanggal 21 November 2015).

Partisipasi dalam Bentuk Bantuan Tenaga

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut hasil pengamatan bakti atau gotong royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Kecamatan,

serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa:

“...kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu biasanya membantu pembersihan atau kerja bakti daerah yang akan di bangun. Tapi terkadang hanya orang-orang yang ada disekitar daerah itu yang hadir yang lain tidak. Begitu juga kalau di daerah mereka kami juga kadang tidak datang...” (wawancara 21 November 2015).

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong hanya dua sampai tiga jam saja dan setelah itu mereka melanjutkan pekerjaan rutin mereka seperti turun ke sawah dan ke kebun. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam bentuk bantuan tenaga dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui responden, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam membersihkan saluran air, perbaikan langsung masyarakat. Partisipasi pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharaan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan. Gambaran jelas tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (fisik) dapat dilihat pada Taabel 4

Tabel 4 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Tenaga Di Kecamatan Tongauna

Partisipasi Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Sering	20	42,10
Sering	30	47,37
Jarang	10	10,53
Tidak pernah	-	-
Jumlah	60	100,00

Sumber: data primer di olah Tahun 2015

Tabel 4 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga, dari 60 responden yang memberikan jawaban, 30 responden menjawab sering. Hal ini didukung oleh jumlah skor yang dicapai yaitu 3,17 yang berarti dalam kategori tinggi. Ini disebabkan karena adanya kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam bentuk bantuan tenaga untuk pembangunan kecamatan. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian ini diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk bantuan tenaga yang sifatnya seperti gotong royong adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun bagi masyarakat kecamatan/desa. Alasan lain adalah adanya suatu kebersamaan bagi masyarakat untuk membangun daerahnya. Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam menunjang pembangunan desa dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk sumbangan ide/pikiran, bantuan keuangan, bantuan material dan bantuan tenaga yang disebutkan terdahulu.

5. Simpulan

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna meliputi: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk sumbangan ide termasuk kategori cukup baik, hal ini dilihat dari keaktifan masyarakat dalam memberikan ide saat kegiatan Musrembang. Kemudian tingkat partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk bantuan keuangan termasuk juga kategori cukup baik, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang secara suka rela memberikan bantuan keuangan pada saat proses pembangunan. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material termasuk kategori rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak memiliki bahan material yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk bantuan tenaga berada pada kategori sangat baik. Artinya bahwa masyarakat dalam keterlibatannya sebagai subjek pembangunan diwujudkan dalam bentuk tenaga/fisik. Hal ini sesuai dengan kondisi fisik masyarakat yang potensial kuat dan rata-rata usia yang masih relatif muda, serta sebagian besar adalah wiraswasta dan petani yang memiliki waktu luang yang cukup.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tongauna antara lain faktor pendukung, antara lain kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena adanya kepedulian untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut, dan di dukung dengan sumbangan ide/pikiran serta bantuan keuangan. Sedangkan faktor penghambat, antara lain masih rendahnya pola pikir masyarakat, waktu serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong sebagian masyarakat kesehariannya tidak berada di desanya karena sedang mencari kerja atau bekerja di daerah lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Konawe dalam Angka 2014*. Konawe: Badan Pusat Statistik
- Bratakusumah, D.S. 1991. *Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah*. Bandung.
- Beratha, I Nyoman. 1981. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Gunawan, Edi. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan.
- Kuncoro, Mudjarad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mansour, Fakih. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar-Yogyakarta.

- Mulyana, Sugih. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. Tesis. Universitas Padjadjaran. Dipublikasikan.
- Pemerintah Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. 2008. *Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, Makalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat*. Kendari.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1991. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Tesis. Universitas Diponegoro. Dipublikasikan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aditama.
- Tikson, D. 2001. *Ekonomi Terpadu dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Materi Kuliah Program Pascasarjana Unhas, Makassar*. Tidak di publikasikan